



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**



Pemerintah Kabupaten Tegal

Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja

Jl. Dr. Soetomo No. 12, Slawi

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022. Rencana Kerja ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, yang pada akhirnya dapat menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tegal serta bermanfaat bagi masyarakat.

Slawi, 2021
Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga
Kerja
Kabupaten Tegal,

MOH. NUR MA'MUN, . SH. M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19620816 198703 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	BAB I - 1
1.2 Dasar Hukum	BAB I - 5
1.3 Maksud dan Tujuan	BAB I - 8
1.4 Sistematika.....	BAB I - 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	BAB II - 1
2.2 Analisa Kerja Pelayanan Perangkat Daerah	BAB II - 10
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	BAB II – 27
2.3.1 Urusan Perindustrian.....	BAB II – 27
2.3.1.1 Pertumbuhan Industri	BAB II – 27
2.3.1.2 Kontribusi Sektor Perindustrian erhadap PDRB.....	BAB II – 28
2.3.1.3 Industri Kreatif	BAB II – 32
2.3.1.4 Kompetensi Inti.....	BAB II – 32
2.3.1.5 Metode One Village One Product (OVP).....	BAB II – 33
2.3.1.6 Penggunaan Produk Lokal.....	BAB II – 33
2.3.2 Urusan Tenaga Kerja.....	BAB II – 34
2.3.2.1 Kondisi Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian	BAB II – 34
2.3.3 Permasalahan dan Solusinya	BAB II – 36
2.3.2.1 Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	BAB II – 36
2.3.2.2 Bidang Perindustrian	BAB II – 39
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	BAB II – 43
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	BAB II – 61

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN TEGAL**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalBAB III – 1
 - 3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian RI.....BAB III – 1
 - 3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI.....BAB III – 3
 - 3.1.3 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa TengahBAB III – 5
 - 3.1.4 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa TengahBAB III – 6
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat DaerahBAB III – 8
 - 3.2.1 Tujuan dan SasaranBAB III – 9
- 3.3 Program dan Kegiatan BAB III - 12

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan PentingBAB V – 1
- 5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan.....BAB V – 2
- 5.3 Rencana Tindak LanjutBAB V – 3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020	BAB II – 4
Tabel 2.2 Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Semt.1).....	BAB II – 7
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020.....	BAB II – 12
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Peindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020.....	BAB II – 25
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	BAB II – 31
Tabel 2.6 Data Potensi Industri Kabupaten Tegal Tahun 2016 - 2020.....	BAB II – 34
Tabel 2.7 Data Capaian Program Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020	BAB II – 36
Tabel 2.8 Ketenagakerjaan Periode 2016 – 2020.....	BAB II – 42
Tabel 2.9 Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Periode 2016-2020 ..	BAB II – 43
Tabel 2.10 Upah Minimum Kabupaten / Kota Tahun 2016 - 2020	BAB II – 43
Tabel 2.11 Penempatan Transmigran Kabupaten Tegal Periode 2016 - 2020	BAB II – 44
Tabel 2.12 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022	BAB II – 52
Tabel 2.13 Usulan Program dan Kegiatan dari Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2022	BAB II – 68
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian beserta faktor penghambat dan Pendorong ...	BAB III – 1
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan RI beserta faktor penghambat dan Pendrong	BAB III – 3
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Srategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024	

.....	BAB III – 6
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024	
.....	BAB III – 8
Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019 – 2024 Perubahan).....	BAB III – 12
Tabel 3.6 Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022	BAB III – 16
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022	BAB IV - 2

BAB I

PENDAHULUAN



Rencana Kerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tegal Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ketiga periode Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024 yang disusun pada tahun 2019. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai salah satu bentuk implementasi Visi Bupati Tegal yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”** dan Misi ke-3 (tiga) yaitu **“Membangun Perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan”** yang apabila dijabarkan secara spesifik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal bertanggungjawab mewujudkan pertumbuhan perekonomian dan tingkat kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat. Misi ke-4 **“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”**. Pada misi ke-4 ini secara spesifik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal bertanggungjawab mewujudkan peningkatan kualitas sosial masyarakat pada bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama

periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional dan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati. Rencana Strategis dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis.

Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang akan di biyai dengan APBD Kabupaten Tegal dan APBN. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan mendasari Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satpol PP Kab. Tegal. Tugas Pokok Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada Urusan Perindustrian, Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Transmigrasi Kabupaten Tegal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sehingga diharapkan melalui Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat tercipta kerjasama yang Sinergis antara Urusan Perindustrian, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi guna Misi No. 3 dan No. 4, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (Renstra-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan, masing-masing memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Rencana Kerja (Renja) merupakan landasan Pedoman Kebijakan Operasional bagi seluruh Bagian/Bidang/Subbag dan Kasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Program/Kegiatan pada setiap tahunnya sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan. Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan

mendasari Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam tahapan pencapaian sasaran dan tujuan Pembangunan Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya diusulkan/dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal. Dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan antara program kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi dinas, kemampuan pembiayaan, output dan outcome serta capaian kinerja yang dirumuskan dan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan khususnya pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam rangka mencapai hasil-hasil pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain hal tersebut baik Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal disusun dalam rangka Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, sebagai salah satu unsur dalam sistem Akuntabilitas, Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal akan meningkatkan kualitas Akuntabilitas Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dan selanjutnya akan mendorong Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Tegal.

Pada era pelaksanaan Otonomi Daerah sekarang ini penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Program/Kegiatan

menjadi sangat penting dan harus benar-benar terukur *output* dan *outcome*-nya serta tepat sasaran.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4279);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota:
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemasang.
22. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 ;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
 32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 ada pada Lampiran 1.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan serta pelayanan yang prima baik pada bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2022.
2. Memberikan acuan kepada *Stakeholder* Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bermuara pada upaya mewujudkan pemerintahan yang baik Tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Taktis Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang berfokus pada isu-isu bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2022 serta sebagai dasar penilaian Akuntabilitas

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

2. Sebagai alat bantu bagi rujukan penilaian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan menggunakan tolak ukur masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL TAHUN LALU.

Dalam Bab II ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal serta Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Review terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL

Dalam Bab III ini memuat tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL

Dalam Bab IV ini memuat tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan Prakiran Maju Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V ini memuat tentang Penutup dari yang didalamnya terdapat Catatan Penting, Kaidah – Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

LAMPIRAN – LAMPIRAN.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEGAL

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 DAN
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal pada tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelayanan Urusan Perindustrian dan Urusan Tenaga Kerja serta Urusan Transmigrasi Kabupaten Tegal tidak terlepas dari tuntutan dan tantangan yang diterjemahkan kedalam Misi ke-3 dan Misi ke-4 Bupati Tegal dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 serta Strategi Pembangunan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Keberhasilan pencapaian Misi tersebut akan sangat ditentukan oleh komitmen dan kesepakatan bersama seluruh pelaku pembangunan. Pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Tegal secara historis mempunyai posisi strategis, terutama karena dilatarbelakangi tradisi turun-temurun dalam aktivitas di sektor ini, dan budaya masyarakat pelaku IKM yang cukup kreatif. Pembangunan berbasis sektor industri merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan Kabupaten Tegal. Upaya/proses pembangunan ke depan dipandang penting untuk semakin bertumpu pada potensi terbaik setempat dan menekankan pemberdayaan pelaku IKM Kabupaten Tegal secara bertahap, serta mendorong posisi strategisnya dalam realita dinamika persaingan yang berkembang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan sehubungan dengan adanya Peraturan

Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah diamanati untuk mengemban tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan untuk urusan : ***perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi.***

Pernyataan tersebut memiliki beberapa makna yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. ***Tenaga Kerja yang Berkualitas***, mengandung arti bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan mandiri untuk dapat diterima lapangan kerja yang tersedia.
- b. ***Industri Unggul dan Berdaya Saing***, mengandung arti **industri yang memiliki** kemampuan produksi yang berkualitas dan harga yang bersaing dengan produk dari daerah lain serta produksi yang tepat waktu, sehingga dapat tercipta tata niaga yang tangguh dan keberlanjutan usaha UKM dapat berjalan dengan baik.
- c. ***Berwawasan Lingkungan***, mengandung arti bahwa industri yang dalam proses produksinya menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dengan cara memperhatikan lingkungan.

Untuk itu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal telah menentukan misi 3 dan 4 yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Membangun Perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan pada intinya adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu ditata dan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dalam setiap tahapan perlu ditentukan prioritas pembangunan yang akan menjadi panduan gerak pembangunan, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gambaran umum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2020.

Secara umum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yaitu “**Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja**”.

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal merupakan Evaluasi atas Kinerja dengan membandingkan antara rencana atas standard yang ditetapkan pada rencana satuan tugas dengan realisasinya, dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kerja

setiap pertanggungjawaban beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Dari berbagai Program dan Kegiatan yang dilakukan, pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah industri dan tenaga kerja menunjukkan perkembangan yang cukup baik sebagaimana yang disajikan dalam tabel sebagai berikut (terlampir), dari anggaran belanja daerah dialokasikan untuk urusan-urusan diantaranya :

Tabel 2.1. Laporan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2020

NO	URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	TARGET RENSTRA 2020	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASI CAPAIAN
Urusan Penunjang					
I. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian		5.410.000.000	2.621.980.000	2.302.048.683	87,80
1	Penyediaan Jasa Kantor	400.000.000	28.500.000	344.060.622	80,29
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	1.115.000.000	886.870.000	759.625.726	85,65
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.400.000.000	1.120.000.000	1.073.901.000	95,88
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.000.000	12.210.000	2.300.000	18,84
4	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	255.000.000	54.000.000	46.391.000	85,91
5	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	45.000.000	45.000.000	44.899.500	99,78
7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	130.000.000	75.400.000	30.870.835	40,94
Urusan Pilihan					
PERINDUSTRIAN					

II. Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan		450.000.000	450.000.000	408.604.500	90,80
8	Pembinaan Peningkatan Kualitas Produksi Industri Ag	250.000.000	250.000.000	227.894.900	91,16
9	Pembinaan Peningkatan Kualitas Produksi Industri Kimia dan Kertas	100.000.000	100.000.000	93.839.800	93,84
10	Pembinaan Peningkatan Kualitas Produksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	100.000.000	100.000.000	86.869.800	86,87
III. Program Peningkatan Layanan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil, dan Aneka		5.570.671.000	2.742.784.000	2.512.275.150	91,60
11	Peningkatan Kemampuan Teknik Produksi Industri Logam	100.000.000	100.000.000	84.779.800	84,78
12	Peningkatan Kemampuan Teknik Produksi Industri Aneka	270.000.000	54.640.000	51.815.000	94,83
13	Peningkatan Kemampuan Teknik Produksi Industri Tekstil	150.000.000	143.000.000	142.943.900	99,96
14	Peningkatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lembaga Penilaian Kesesuaian Produk Industri	500.000.000	500.000.000	449.572.800	89,91
15	Pengadaan Peralatan Pengujian Laboratorium	143.000.000	-	-	0,00
16	Peningkatan Fasilitas Operasional Penunjang LIK	200.000.000	23.940.000	21.240.000	88,72
17	Revitalisasi LIK	4.207.671.000	1.921.204.000	1.761.923.650	91,71
TENAGA KERJA					
IV. Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja		1.580.000.000	1.147.584.000	812.739.300	70,82
18	Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat	1.130.000.000	752.484.000	648.239.500	86,15
19	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	190.000.000	170.175.000	130.070.000	76,43
20	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	85.000.000	49.925.000	34.429.800	68,96

21	Pengembangan dan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	175.000.000	175.000.000	-	0,00
V. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		420.000.000	223.033.000	159.565.200	71,54
22	Pelaporan dan Sinergitas Pendataan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan	155.000.000	109.336.000	56.732.800	51,89
23	Pembinaan dan Verifikasi SP/SB di Dalam dan Luar Perusahaan	265.000.000	113.697.000	102.832.400	90,44

Rata-rata realisasi anggaran kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal telah mencapai efektivitas yang cukup tinggi, dari 23 Kegiatan yang dianggarkan pada APBD 2020 hanya terlaksana 21 Kegiatan, terdapat 1 kegiatan yang terkena *refocusing* anggaran yaitu kegiatan Pengadaan Peralatan Pengujian Laboratorium dan 1 kegiatan lainnya yang tidak terlaksana adalah kegiatan Pengembangan dan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM karena pelaksanaannya tertunda pada kondisi pandemic Covid-19 ini, adapun kegiatan yang capaian keuangannya masih sangat rendah sebesar 18,84 % adalah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dikarenakan perencanaan kegiatan yang kurang tepat, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegalpun tidak dilaksanakan.

Tabel 2.2 Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal
Semester I Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA	TARGET 2021	REALISASI SEMESTER I	PRESENTASE CAPAIAN
TOTAL PAGU		7.198.602.800	11.640.134.200	3.374.005.165	28,99%
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		4.739.812.800	9.454.971.200	2.963.990.565	31,35%
1	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.160.500	80.160.000	11.902.500	14,85%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.114.500	54.114.500	11.902.500	22,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.046.000	26.045.500	-	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.681.000	4.763.840.000	2.710.094.130	56,89%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.715.159.000	2.691.494.130	57,08%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48.681.000	48.681.000	18.600.000	38,21%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.893.000	279.892.900	21.964.591	7,85%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.517.000	21.517.400	-	0,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.807.000	80.806.500	-	0,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.380.000	23.380.000	-	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.880.000	36.880.000	14.849.000	40,26%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.609.000	34.609.000	1.500.000	4,33%

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.870.000	10.870.000	2.000.000	18,40%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.830.000	71.830.000	3.615.591	5,03%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.492.190.000	3.492.190.000	-	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.893.000	141.893.000	-	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	300.000.000	-	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.050.297.000	3.050.297.000	-	0,00%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.411.000	404.411.000	160.169.106	39,61%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.971.000	249.971.000	92.609.106	37,05%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.440.000	154.440.000	67.560.000	43,75%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.477.300	434.477.300	59.860.238	13,78%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.000.000	260.000.000	56.275.238	21,64%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.960.400	72.960.400	3.585.000	4,91%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.516.900	101.516.900	-	0,00%
II. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		1.425.000.000	1.048.096.000	254.526.800	24,28%
8	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.425.000.000	1.048.096.000	254.526.800	24,28%

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	25.000.000	93.296.000	13.930.000	14,93%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	350.000.000	267.002.000	75.113.800	28,13%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	750.000.000	323.379.000	118.471.200	36,64%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	250.000.000	350.086.000	47.011.800	13,43%
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	50.000.000	14.333.000	-	0,00%
III. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota		100.000.000	17.929.000	1.002.000	5,59%
9	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	17.929.000	1.002.000	5,59%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kab/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100.000.000	17.929.000	1.002.000	5,59%
IV. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		150.000.000	24.080.000	-	0,00%
10	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	24.080.000	-	0,00%
	Desiminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kab/Kota	150.000.000	24.080.000	-	0,00%

V. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		390.000.000	719.725.000	-	0,00%
11	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	286.000.000	616.069.000	-	0,00%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	286.000.000	616.069.000	-	0,00%
12	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	104.000.000	103.656.000	-	0,00%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	104.000.000	103.656.000	-	0,00%
VI. Program Penempatan Tenaga Kerja		110.000.000	108.518.000	47.520.000	43,79%
13	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	110.000.000	108.518.000	47.520.000	43,79%
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	110.000.000	108.518.000	47.520.000	43,79%
VII. Program Hubungan Industrial		208.790.000	196.815.000	106.965.800	54,35%
14	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.597.000	41.597.000	-	0,00%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Inormasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	41.597.000	41.597.000	-	0,00%
15	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	167.193.000	155.218.000	106.965.800	68,91%
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	167.193.000	155.218.000	106.965.800	68,91%
VIII. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		75.000.000	70.000.000	-	0,00%

16	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot	75.000.000	70.000.000	-	0,00%
	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota	75.000.000	70.000.000	-	0,00%

Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Semester I Tahun 2021 hanya mencapai 28,99% sedangkan capaian fisiknya adalah sebesar 36,91%, efektivitas yang masih rendah ini dikarenakan beberapa kegiatan memang terjadwal pelaksanaannya pada triwulan III selain itu adanya proses *Refocusing* pada bulan Maret 2021 yang menyebabkan beberapa anggaran kegiatan berkurang sehingga berubah pula konsep dan waktu pelaksanaannya. Bahkan beberapa kegiatan rutin yang berkurang anggarannya tertunda pelaksanaannya hingga menunggu jadwal perubahan anggaran untuk dapat dilaksanakan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian adalah melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dengan tertib administrasi sehingga capaian fisik dan keuangannya seimbang.

TABEL 2.3. (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020

Kabupaten Tegal

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL									
	NON URUSAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300%	300%

				Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah								
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8	24	300%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4	12	300%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercukupinya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan								
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tercukupinya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	36	300%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pegawai								
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat, Bimtek	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0%	-	2	200%
				Administrasi Umum	Tercukupinya								

				Perangkat Daerah	Layanan Umum Perangkat Daerah								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100%	1	2	200%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1	3	300%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1	3	300%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	12	300%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	36	300%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	36	300%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	36	300%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Jasa dan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Berkualitas								

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1	3	300%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1	3	300%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Perindustrian	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	5	7	300%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran yang Berkualitas								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, air, listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	36	300%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	36	300%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Operasional	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12	36	300%

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1	3	300%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercukupinya Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1	3	300%
					Pemeliharaan Rutin Berkala Laboratorium Uji dan Pemesinan (UPTD LAB.)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1	3	300%
				URUSAN TENAGA KERJA									0
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	50%	0%	0%		100%	150%	30%
				Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Tersusunnya dokumen rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen		1	3	300%
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen		1	3	300%
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0.009			0,008		0.009	0,017	

				Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	5,50			3,70		5,50	9,20	
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	46,24		44,44%		46,24	90,60	
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Penganggur yang dilatih	300	320	576		300	1.196	373,8%
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	14,29		4,76%		14,29	19,05	
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Instruktur bersertifikat kompetensi	55		0,14%		55	55,14	13,785
					Persentase LPK yang memiliki perizinan	52		9,52%		52	61,52	15,38
				Pengukuran produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi tenaga kerja	300		0		0	0	0
				Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi tenaga kerja	300		0,00		0	0	0

			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	30,00			17,82		30,00	47,82	11,955
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui informasi pasarkerja (IPK) online (SISNAKER)	2.976			2.706		2.976	5.682	1420,5
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencarikerja yang terdaftar di Kabupaten	16.589			15.189		16.589	31.778	7944,5
				Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI/CTKI yang terdata	213			193		213	406	101,5
				Lowongan kerja yang tersedia diwilayah kabupaten	2.965			2.713		2.965	5.678	1419,5
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pekerja Migran (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan diklat kerja	250			167		0	167	41,75

			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	40			0		0	0	0
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	7,78			7,08		7,78	14,86	3,715
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	41,98			38,18		41,98	80,16	20,04
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	24,19			15,59		24,19	39,78	9,945

				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,05			1,05		1,05	2,1	0,525
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh mediator Hubungan Industrial	92,59			92,59		92,59	185,18	46,295
				URUSAN PERINDUSTRIAN									
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	70			60%		70	130	32,5
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan industri dalam RPIK	70			60%		70	130	32,5

			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah penguatan sentra unggulan Kab. Tegal	90 sentra			80 sentra	90	170	42,5
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan standarisasi	275 IKM	-		225 IKM	275	500	125
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pembangunan infrastruktur industri kecil menengah	15 IKM	-		5 IKM	15	20	5
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pengembangan wirausaha baru	15 kelompok WUB	-		5 kelompok WUB	15	20	5
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pembinaan sektor industri unggulan terhadap semua jumlah sektor industri unggulan	75 IKM	-		25 IKM	75	100	25

			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB./KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	-		100%		100	200	50
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis	100	-		100%		100	200	50
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kab/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis	100%	-		100%		100%	200%	0,5
			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan (IUI) kewenangan Kab/Kota dalam memenuhi ketentuan perizinan	Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan terhadap permohonan yang masuk SIINas	100%	-		100%		100%	200%	0,5

			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	60	-		20%		60	80	20
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data IKM yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi IKM	30	-		10%		30	40	10
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Jumlah IKM yang melakukan pelaporan usaha melalui SIINas terhadap IKM yang masuk di SIINas	75%	-		50%		75%	125%	0,3125
			Desiminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kab/Kota	Tersusunnya data base IKM	6 Kecamatan	-		2 Kecamatan		6	8	2
			URUSAN TRANSMIGRASI									
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	100	100		0		100	100	25
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	3 KK	3 KK		0		3 KK	3	0,75

			Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	3 KK	3 KK		0		3 KK	3	0,75
--	--	--	---	--	------	------	--	---	--	------	---	------

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang ingin diwujudkan/dicapai dalam tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020

NO	URUSAN/ SASARAN RENSTRA	URAIAN PROGRAM /KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	TENAGA KERJA / Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja			
		AKAN	660	193	29,24
		AKAD	246	1020	414,63
		AKL	140	1493	1066,43
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat			
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat	32	20	62,50
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan			
		Jumlah Pembinaan Lembaga	2	40	2000,00
		Kegiatan Informasi Bursa Tenaga Kerja			
		Jumlah Terlayannya Pencaker	12000	15189	126,58
	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial			

	kerja, keselamatan dan kesehatan kerja				
		Presentase penyelesaian hubungan industrial	50%	100%	200,00
		Kegiatan Pelaporan dan Sinergitas Pendataan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
		Jumlah Pembinaan terhadap Perusahaan	40	40	100,00
		Kegiatan Pembinaan dan Verifikasi SP/SB di dalam dan Luar Perusahaan			
		Jumlah Kasus Perselisihan yang terselesaikan	15	27	180,00
2	PERINDUSTRIAN/ Meningkatnya mutu produk IKM dan Perluasan pasar dan Kepastian berusaha bagi IKM Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil dan Aneka	Program Peningkatan Layanan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi			
		Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	7,90	-0,46	-5,82
		Cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka	4,95	4,66	94,14
		Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknik Produksi Industri Logam			

		Jumlah Pembinaan IKM Logam	20	20	100,00
		Kegiatan Peningkatan Fasilitas Operasional Penunjang LIK			
		Terpenuhinya penunjang LIK	1	1	100,00
		Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknik Produksi Industri Aneka			
		Jumlah Pembinaan IKM Aneka dan Kerajinan	20	20	100,00
		Kegiatan Pengadaan Ruang Pamer Dekranasda	1	1	100,00
		Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknik Produksi Industri Tekstil			
		Jumlah Pembinaan IKM Tekstil	40	40	100,00
		Kegiatan Revitalisasi LIK			
		Terlaksananya Pengadaan Mesin SST, Grinding dan Forklift	3	3	100,00
		Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Lembaga Penilaian Kesesuaian Produk Industri			

		Peningkatan Kompetensi Teknis Personil Lab. Uji, Machining, TUK	4	4	100,00
		Kalibrasi Peralatan Pengujian dll.	1	1	100,00
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Pengujian Laboratorium			
		Tersedianya Peralatan Pengujian Lab.	1	0	0,00
	Meningkatnya mutu produk IKM dan Perluasan pasar dan Kepastian berusaha bagi IKM Agro, Kimia dan Hasil Hutan	Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan			
		Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro, kimia dan hasil hutan	7,40	-0,46	- 6,22
		Cakupan bina kelompok pengrajin industri agro, kimia dan hasil hutan	7,20	7,19	99,86
		Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Produksi Industri Agro			
		Jumlah Pembinaan IKM Agro	75	75	100,00
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Produksi Industri Kimia dan Kertas			
		Jumlah Pembinaan IKM Kimia dan Kertas	20	11	55,00
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Produksi Industri			

		Hasil Hutan dan Perkebunan			
		Jumlah Pembinaan IKM Hasil Hutan dan Perkebunan	20	40	200,00
3	TRANSMIGRASI / Meningkatkan layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja			
		Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM			
		Presentase Transmigran yang ditempatkan	100%	0	0

Dari data capaian kinerja Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal terdapat beberapa indikator program yang capaiannya masih rendah salah satunya adalah Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dengan capaian indikator Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) sebesar 29,24%, dari target capaian sebanyak 660 orang hanya tercapai 193 orang. Hal ini dikarenakan dampak kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan program penempatan tenaga kerja antar negara diberhentikan. Sedangkan dampak lain dari kondisi pandemi ini, keterbatasan akses dan lowongan pekerjaan di Negara lain, banyak pencari kerja yang justru ditempatkan di daerah lokal ataupun penempatan antar daerah selama tahun 2020 ini.

Alat Transportasi dan Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan juga terdapat indikator pertumbuhan sub sektor industri yang capaiannya sangat rendah akibat kondisi pandemic Covid-19, namun kegiatan-kegiatan pendukung program tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan anggaran yang tersedia hingga mampu mencapai indikator kegiatan dengan capaian yang cukup tinggi.

Adapun ketidaktercapaian target indikator beberapa kegiatan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana tersebut diatas rata-rata dikarenakan terbatasnya anggaran terhadap alokasi kegiatan tersebut dan bahkan ada yang terkena *refocusing* anggaran sehingga tidak dilaksanakan sama sekali yaitu Kegiatan Pengadaan Peralatan Pengujian Laboratorium. Adapun pada Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM ditunda pelaksanaannya karena kondisi Pandemi Covid-19.

TABEL 2.5. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tegal

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Laju Pertumbuhan Lapangan usaha industri			-0,91	6,16	6,24	6,31	-0,91	6,16	6,24	6,31	
	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing			60	60	70	80	60	60	70	80	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP			60,00	60,00	70,00	80,00	60,00	60,00	70,00	80,00	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Persentase Industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)			20	40	60	80	20	40	60	80	
Tingkat Pengangguran Terbuka			9,82	7,2	7,05	6,85	9,82	7,2	7,05	6,85	
Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja			-49,55	5	10	15	-49,55	5	10	15	
Persentase penyelesaian hubungan industrial			50	55	65	70	50	55	65	70	
Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi			0	100	100	100	0	100	100	100	
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			100	100	100	100	100	100	100	100	
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			0,008	0,009	0,009	0,009	0,008	0,009	0,009	0,009	
Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi			3,70	4,60	5,50	6,40	3,70	4,60	5,50	6,40	
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah			17,82	25,00	30,00	35,00	17,82	25,00	30,00	35,00	

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			7,08	7,43	7,78	8,13	7,08	7,43	7,78	8,13	
Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari provinsi			0	100	100	100	0	100	100	100	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

2.3.1. Urusan Perindustrian

2.3.1.1. Pertumbuhan Industri

Kecenderungan membaiknya Perekonomian Nasional dan Regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Tegal mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Tegal, terutama industri olahan. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan 2.7.

Tabel 2.6.
Data Potensi Industri Kabupaten Tegal
Tahun 2016 – 2020

NO	JENIS INDUSTRI	2016	2017	2018	2019	2020
		JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH UNIT USAHA
1	INDUSTRI LOGAM DAN MESIN ELEKTRONIKA					
	Besar	-	-	-	-	
	Sedang	22	22	23	24	24
	Kecil	2,973	2,985	2,990	2999	2999
2	INDUSTRI KIMIA DAN KERTAS					
	Besar	-	-	-		
	Sedang	12	12	12	12	12
	Kecil	11,851	4,844	4,852	4852	4852
3	INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA					
	Besar	8	8	8	10	10
	Sedang	8	8	8	6	
	Kecil	11,835	11,835	11,858	11874	
4	INDUSTRI					

	AGRO DAN HASIL HUTAN					
	Besar	5	5	5	7	
	Sedang	18	18	18	18	
	Kecil	9,970	9,960	9,968	9983	

2.3.1.2. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Sektor industri di Kabupaten Tegal di Dominasi oleh Industri Makanan, Tekstil dan Mesin. Industri makanan terutama didorong oleh adanya Pabrik Teh yang berskala Nasional, serta Industri Kecil dan Menengah yang memproduksi Makanan Ringan serta Tempe dan Tahu. Industri tekstil didorong dengan adanya usaha konfeksi yang relatif maju dan sudah dapat menembus pasar daerah lain. Sementara, industri mesin merupakan industri yang sudah ada sejak lama; sesuai dengan julukan Kabupaten Tegal sebagai Jepang-nya Indonesia. Industri mesin ini didukung dengan adanya **“UPTD LIK TAKARU”** di Kecamatan Kramat yang merupakan sumber difusi inovasi bagi pengembangan usaha produksi mesin. Sektor perindustrian di Kabupaten Tegal berkontribusi paling besar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Tegal.

Kontribusi sektor Perindustrian terhadap nilai PDRB Kabupaten Tegal, selama 3 (Tiga) Tahun terakhir sejak 2017-2019, besarnya kontribusi sektor Perindustrian terhadap Kabupaten Tegal setiap Tahun mengalami peningkatan.

Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian pada Tahun 2020 sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Tegal melalui target yang sudah di tentukan.

Tabel 2.7.
Data Potensi Industri Kabupaten Tegal
Tahun 2016 – 2020

Program/Indikator	Target RPJMD	Target Capaian Kinerja Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK						
Jumlah Pembinaan IKM	45	30	72	80	180	186
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENGAH						
Jumlah Kerjasama IKM	16	11	12	14	16	16
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI						
Jumlah Klaster	17	9	10	12	17	17

a. Penguatan Basis Data dan Teknologi Informasi.

Basis Data dan Informasi merupakan salah satu Instrumen yang selalu digunakan manajemen sebagai dasar dalam rangka pengambilan keputusan dan memberikan respons yang tepat guna memberikan informasi yang diinginkan pihak lain. Oleh karena itu penataan basis data menjadi isu yang strategis di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal untuk dikembangkan dan ditata dalam satu sistem informasi yang terstruktur, terpusat dan dengan kemampuan sumber daya yang ada keberadaan basis data akan selalu dilakukan pemutakhiran untuk menjamin keakuratan dan kevalidan data yang ada.

Dalam rangka memberikan akses pelayanan informasi

kepada masyarakat industri dan Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selalu membangun basis data untuk mempercepat akses informasi berupa internet dan jaringan lokal untuk menunjang pelayanan publik dan sebagai pemercepat **“ARUS INFORMASI DAN TRANSFORMASI PENGETAHUAN BAGI MASYARAKAT INDUSTRI DAN KETENAGAKERJAAN”**.

b. Klaster Industri.

Klaster Industri sejumlah Perusahaan dan Lembaga yang terkonsentrasi pada suatu Wilayah, serta Saling Berhubungan dalam Bidang yang Khusus yang mendukung Persaingan (*Michael E. Porter*).

Kebijakan Pembangunan Industri, khususnya Industri Kecil salah satunya adalah menggunakan Pendekatan Klaster secara Definitif yaitu sekumpulan pelaku ekonomi yang terkonsentrasi dalam satu wilayah Geografis. Elemen-elemen Dasar Klaster adalah :

- Industri inti.
- Industri pemasok.
- Industri Pesaing.
- Industri pendukung.
- Pembeli.

Tujuan Pembangunan Klaster yaitu Meningkatkan Jaringan yang disebut Rantai Nilai diantara Entitas-entitas Klaster sehingga apabila dinamika klaster dapat dijaga yang akan memperoleh manfaat adalah Keseluruhan Entitas yang ada dalam satu kelompok klaster bahkan tidak tertutup kemungkinan berkembang terjadi Transaksi Bisnis Lintas Klaster.

c. Sistem Inovasi.

Inovasi adalah Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Perencanaan yang bertujuan Mengembangkan Penerapan Praktis Nilai dan Konteks Ilmu Pengetahuan yang Baru, atau Cara Baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (UU 18/2002) :

- a. Mengkoordinasikan persiapan pembentukan Pusat Inovasi IKM.
- b. Mendorong upaya pemanfaatan hak karya intelektual yang telah menjadi milik dan menyebarkan hasil riset dan temuan produk inovatif untuk dimanfaatkan oleh IKM.
- c. Menyusun kerangka kebijakan, program dan regulasi dan peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan Pusat Inovasi IKM.
- d. Menyiapkan rancang bangun kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung operasional Pusat Inovasi IKM.
- e. Menyiapkan skema penyediaan dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan pembentukan dan operasional Pusat Inovasi IKM.
- f. Menyediakan cetak biru (blue print) arah kebijakan dan Rencana Garis Besar (road Map) Pengembangan dan Operasional Pusat Inovasi IKM.
- g. Melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perindustrian dan Menteri Koordinator Bidang Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi.

Daya Saing Perlu dibangun melalui Peningkatan Kapasitas Inovatif, sedangkan Kapasitas Inovatif akan muncul ketika tersedia Infrastruktur Inovasi Umum dan Khusus

disertai dengan Hubungan yang Erat antara keduanya. Pembangunan Infrastruktur tersebut memerlukan Prakarsa-prakarsa dengan beragam Tema.

2.3.1.3. Industri Kreatif.

Industri Kreatif merupakan Pilar Utama dalam mengembangkan sektor Ekonomi Kreatif yang memberikan dampak yang Positif bagi kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Belum ada gambaran yang jelas mengenai Kondisi Industri Kreatif di Kabupaten Tegal yang dapat dijadikan Bahan Dasar untuk melakukan Analisis, Pembuatan Kebijakan atau Pengambilan Keputusan yang Signifikan bagi Pertumbuhan Ekonomi Kreatif ini. Sehingga Industri kreatif dapat didefinisikan sebagai berikut: ***“Industri yang berasal dari Pemanfaatan Kreatifitas, Ketrampilan serta Bakat Individu untuk Menciptakan Kesejahteraan serta Lapangan Pekerjaan dengan Menghasilkan dan Mengeksploitasi Daya Kreasi dan Daya Cipta Individu tersebut “.***

2.3.1.4. Kompetensi Inti.

Terselesaikannya ketidakserasian karena adanya Disparitas antar Wilayah :

- ✓ Terjadinya Kerjasama antar Daerah berlandaskan Kedekatan dan Potensi yang sama serta masuk dalam Rantai Nilai Komoditi yang akan dikembangkan.
- ✓ Memanfaatkan Sumber Daya termasuk Sumber Daya Alam yang dimiliki Daerah secara Optimal.
- ✓ Menyebarkan Industri ke berbagai Daerah.
- ✓ Meningkatkan Daya Saing Daerah berlandaskan Keunggulan Daerah yang dimiliki.

- ✓ Meningkatkan Nilai Tambah sepanjang Rantai Nilai Komoditi Unggulan Daerah.
- ✓ Membangun Keunikan yang dimiliki Daerah.
- ✓ Terbangunnya kerjasama yang Harmonis antar Daerah.

2.3.1.5. Metode OVOP (*One Village One Product*).

Penyebaran Potensi di masing-masing Wilayah yang memiliki kesamaan Jenis Produk dan Kemampuan Daya Saing Berbeda, akan menimbulkan Kompetisi yang Tidak Menguntungkan. Untuk mengurangi kesenjangan yang ada pengembangan potensi industri kecil di wilayah lebih diarahkan melalui pendekatan OVOP sehingga setiap wilayah yang memiliki Produk Spesifik akan Lebih Berdaya Saing dan Pembangunan Ekonomi dipedesaan berkembang.

Ragam Produk dan Ragam Teknologi yang ada dalam satu wilayah telah menciptakan Persaingan yang Tidak Sehat sehingga akhirnya akan Mengorbankan Kualitas Produk setempat, Ragam Potensi tersebut juga Cenderung Menyulitkan para Pemangku Kepentingan dalam melakukan Pembinaan dikarenakan Perilaku pelaku Usaha yang sering Mengedepankan Karakter Individual.

Berbagai Prakarsa telah dilakukan oleh Pembina Teknis namun demikian belum memberikan Hasil yang Memuaskan sehingga diperlukan Pendekatan yang lebih Spesifik yang dapat menjangkau seluruh wilayah dalam satu komoditas yang sama, Pendekatan *one vilage one produk* diarahkan untuk mengurai persoalan-persoalan seperti diatas.

2.3.1.6. Penggunaan Produk Lokal.

Mendorong atau Memotivasi masyarakat untuk lebih mencintai terhadap produk-produk Industri Lokal dapat menumbuh-kembangkan industri kecil dan menengah yang ada, dengan demikian Pertumbuhan Ekonomi terus Meningkat dan Kesejahteraan Masyarakat Terwujud. Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Lokal melalui Even atau Kegiatan sebagai berikut :

- Belanja Pemerintah (Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD).
- Hari Ulang Tahun Kabupaten Tegal.
- Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Kegiatan lain yang dapat dikaitkan dengan Peningkatan Penggunaan Produk Lokal.

2.3.2. TENAGA KERJA.

2.3.2.1. Kondisi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Jumlah Tenaga Kerja semakin bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah Penduduk, namun di lain pihak lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas. Oleh sebab itu bertambahnya Tenaga Kerja perlu kiranya diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Ketimpangan antara jumlah Tenaga kerja dengan Kemampuan dalam menyerap Tenaga Kerja tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi saja, tetapi juga oleh perubahan struktur umur Penduduk sebagai akibat dari penurunan angka kematian bayi atau meningkatnya angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Tegal.

a. Data Ketenagakerjaan

Tabel 2.8. : Ketenagakerjaan Periode 2016 – 2020

NO	JENIS DATA	JUMLAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk 15 tahun ke atas	1.424.891	1.446.264	1.100.711	1.055.410	1.075.255
2	Angkatan Kerja	900.214	15.551	730.970	688.796	715.224
3	Bukan Angkatan Kerja	524.6677	1.031.870	369.741	366.614	360.031
4	Bekerja	712.528	4.555	667.420	650.593	644.978
5	Pengangguran	187.686	11.522	53.550	58.203	70.246
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,17 %	81%	69,3%	65.26 %	66,52%
7	Tingkat Kesempatan Kerja	53.73%	97.10%	92,31%	91.55 %	90,18%
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	54,7 %	5,47%	7,70%	8.45 %	9,82%
9	Jumlah Pencari Kerja terdaftar	11.788	6.007	15.464	10.432	15.189
10	Penempatan AKL	729	120	2264	1179	839
11	Penempatan AKAD	91	231	3986	932	1.020
12	Penempatan AKAN	500	653	2133	669	193
13	Penempatan Transmigrasi	7 KK / 22 Jiwa	4 KK/21 Jiwa	3KK/13Jiwa	3 KK / 16 Jiwa	-
14	Pelatihan Berbasis Kompetensi	-	-	224	40	20
15	Pelatihan Berbasis Masyarakat	-	-	160	48	16
16	Pelatihan	-	-	-	-	-

	Kewirausahaan					
17	Pelatihan Usaha Mandiri	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perinnaker Kab.Tegal 2021

Tabel 2.9 : Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Periode 2016 – 2020

NO	Jenis Perselisihan Hubungan Industrial	JUMLAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perselisihan PHK	15 Kasus 20 orang	15 Kasus 20 Orang	15 Kasus 20 Orang	15 Kasus 20 Orang	27 Kasus
2	Perselisihan Kepentingan	-	-	-	-	-
3	Perselisihan antar SP/SB dalam 1 Persh	-	-	-	-	-
4	Perselisihan Hak	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perinnaker Kab.Tegal 2021

Tabel 2.10 : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 –
2020
Dan KHL Sebagai Dasar Penetapan UMK

NO	TAHUN	K H L	U M K	% UMK / KHL
1	2016	-	1.373.000	100 %
2	2017	-	1.487.000	100%
3	2018	-	1.617.000	100%
4	2019			
5	2020			

Sumber : Dinas Perinnaker Kab.Tegal 2021

b. Data Transmigrasi

Tabel 2.11. : Penempatan Transmigran Kabupaten Tegal
Periode 2016 – 2020

NO	TAHUN	LOKASI PEMPATAN	JUMLAH	
			KK	JIWA
1	2016	Sandalan Kab. Palu dan Bukit Aren Gorontalo	7	22
2	2017	UPT Bukit Aren, Gorontalo Prov Gorontalo 2 KK dan 8 Jiwa dan Kolaka Timur Tongauna Prov Sultera 2 KK 13 Jiwa	4	21
3	2018	Desa Batu Anpar Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu	3	13
4	2019	Tanjung Buka SP 6 Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara	3	16
5	2020	-	-	

Sumber : Dinas Perinnaker Kab.Tegal 2021

2.3.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA

2.3.3.1. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Urusan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- 1) Belum adanya koordinasi yang integrative antara Perangkat Daerah/lembaga dan swasta yang melaksanakan pelatihan dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal;
- 2) Lapangan Pekerjaan/kesempatan kerja yang terbatas;
- 3) Tingginya jumlah pengangguran;
- 4) Akses informasi lapangan kerja sulit;
- 5) Rendahnya kualitas angkatan kerja/rendahnya ketrampilan/skill tenaga kerja;
- 6) Masih banyaknya angkatan kerja yang belum memandang pelatihan ketrampilan kerja sebagai kebutuhan;

- 7) Lapangan kerja tidak sesuai pendidikan;
- 8) Penganggur atau pencari kerja kurang memiliki kreatifitas dan inovasi-inovasi;
- 9) Banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja;
- 10) Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan social
- 11) Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
- 12) Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim;
- 13) Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan structural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal;
- 14) Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI;
- 15) Pemahaman pelaku usaha khususnya pemberi kerja tentang kewajiban melaporkan lowongan kerja masih rendah;
- 16) Kurangnya investasi yang menggerakkan perekonomian untuk membuka lapangan usaha dan lapangan kerja baru;

- 17) Sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat mengenai pendataan pencari kerja masih belum sempurna;
- 18) Keterbatasan dana pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun tidak dapat diatasi karena banyaknya pengangguran, sulitnya lapangan pekerjaan, dan tidak sesuai dengan angka tenaga kerja yang bertambah;
- 19) Lokasi penempatan transmigran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh calon transmigran;
- 20) Kuota pemberangkatan transmigran terbatas.

Solusi dari permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan pendekatan guna mendapatkan titik temu dengan adanya pembinaan, pemberdayaan, kerjasama, dan bintek bagi lembaga;
- 2) Memberi kemudahan perizinan bagi investor dan pengembang sehingga tenaga kerja lokal bisa diprioritaskan;
- 3) Meningkatkan kompetensi sebagai life skill bagi pencaker melalui pelatihan ketrampilan kerja;
- 4) Meningkatkan sistem informasi bursa tenaga kerja yang sinergi dan optimal;
- 5) Menambah kegiatan pelatihan ketrampilan kerja bagi pencaker/masyarakat;
- 6) Mensosialisasikan tentang pentingnya dunia ketenagakerjaan , pelatihan ketrampilan kerja kepada lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan kuliah;
- 7) Mengusulkan program pendidikan sekolah yang mengacu pada pasar kerja dan dunia iptek;

- 8) Mengembangkan program gerakan penanggulangan pengangguran dan job fair secara periodik;
- 9) Mendorong pengembangan dan peningkatan lembaga penempatan kerja (PPTKIS dan BKK) pada jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan;
- 10) Menciptakan adanya rumah singgah dan bengkel kerja bagi yang membutuhkan;
- 11) Mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk kegiatan diklat, bintek, atau up grading SDM;
- 12) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana SDM untuk menunjang kinerja yang optimal;
- 13) Mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan daya ungkit produktivitas kerja;
- 14) Meningkatkan anggaran diklat pegawai;
- 15) Mewajibkan lapor bagi perusahaan lokal apabila ada lowongan kerja;
- 16) Mempermudah perizinan usaha/investor dan perubahan lahan hijau ke pendaratan;
- 17) Mengembangkan sistem bursa kerja on line secara online;
- 18) Meningkatkan program pendampingan guna memperoleh data yang akurat;
- 19) Mengikuti program transmigrasi dengan pola sharing;
- 20) Memberikan informasi yang lengkap kepada peminat transmigran tentang lokasi penempatan transmigran

2.3.3.2. Bidang Perindustrian

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Urusan Perindustrian adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar serta koordinasi dengan

- berbagai *stakeholder* dalam rangka pengembangan IKM;
- 2) Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industry;
 - 3) Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis;
 - 4) Lemahnya daya saing, kualitas dan desain produk Industri Kecil Menengah, ditandai dengan rendahnya perolehan standarisasi produk. Capaian produk IKM Tegal dalam memperoleh sertifikat SNI masih terbilang rendah, hal ini dikarenakan syarat dan prosedur untuk memperoleh SNI yang cukup ketat. Selain itu, karakteristik pelaku usaha atau industri kecil menengah dalam menjalankan usahanya yang masih lemah dari sisi pengelolaan manajemen dan produksi, membuat perlu usaha extra keras dari IKM itu sendiri maupun Dinas Perinnaker sebagai instansi pembina agar produk-produk lokal bisa mendapatkan sertifikasi SNI agar bisa meningkat daya saingnya;
 - 5) Nilai tambah dan daya saing produk IKM pangan lokal masih belum optimal karena masih banyak yang belum memiliki sertifikat P-IRT, Sertifikasi Halal dan kemasan produk yang sederhana. Selaian itu Perlu penyederhanaan perolehan P-IRT guna mendukung iklim usaha yang kondusif;
 - 6) Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melengkapi perijinan yang dipersyaratkan untuk mengakes program restrukturisasi mesin (IUI)
 - 7) Masih banyak produk IKM lokal yang belum terlindungi dari sisi Hak Atas Kekayaan Intelektual.

- 8) Rendahnya ketersediaan tenaga kerja industri yang kompeten dan tersertifikasi;
- 9) Kurangnya implementasi alih teknologi dan desiminsi hasil purwarupa (*prototyping*);
- 10) Lemahnya pemutakhiran dan belum tersedianya data IKM yang akurat dan dinamis, dikarenakan luasnya cakupan dan keterbatasan sumber daya;
- 11) Keterbatasan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan Kabupaten Tegal, seperti produk IKM Logam dll.

Solusi dari permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Memfasilitasi kerjasama dengan industri besar, seperti PT. Sumitomo, PT. Astra Honda Motor, Polytron, dsb. Serta mengkoordinasikan dengan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, regulasi perijinan, yang berkaitan dengan pengembangan IKM.
- 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai stakeholder berkaitan dengan pengaturan wilayah Kawasan Industri untuk meningkatkan investasi industri yang telah dikaji untuk dijadikan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal (RPIK)
- 3) Penambahan fasilitas layanan teknis, yaitu rintisan “*welding center*” dan “rumah kemasan”
- 4) Dalam upayanya memenuhi capaian target produk IKM Kab.Tegal memperoleh sertifikasi SNI, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan pendampingan ke IKM secara maksimal dan bertahap. Pada tahun 2018, Dinas Perinnaker mengagendakan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Mutu

Bagi IKM, dimana dokumen mutu ini merupakan salah satu prasyarat utama bagi IKM untuk memperoleh SNI. Selain itu Dinas Perinnaker juga berupaya bersinergi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar IKM Kabupaten Tegal bisa memperoleh fasilitasi sertifikasi SNI.

- 5) Berupaya secara konsisten melaksanakan kegiatan fasilitasi kepada IKM Pangan, seperti : Sertifikasi Halal, Pendaftaran PIRT, Fasilitasi Desain Kemasan dengan harapan IKM pangan lokal bisa lebih berdaya saing. Selain itu, untuk mengatasi hambatan yang dihadapi IKM Pangan dalam proses pengurusan PIRT, Dinas Perinnaker juga mendorong agar ada kebijakan atau regulasi yang efektif sehingga iklim usaha yang kondusif bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil (IKM) pangan.
- 6) Mengkoordinasikan dengan stakeholder berkaitan dengan regulasi IUI serta mensosialisasikan program restrukturisasi mesin.
- 7) Berupaya melaksanakan kegiatan Fasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi produk – produk lokal IKM Kab.Tegal.
- 8) Berupaya melaksanakan pelatihan-pelatihan baik itu dengan biaya APBD II, APBD I (Provinsi), maupun APBN (Kementrian) yang berstandar dan bersertifikat industri, seperti pelatihan pengelasan dan penyusunan dokumen sistem mutu.
- 9) Berupaya melaksanakan kegiatan prototyping mesin, baik itu kerjasama dengan pihak akademisi, lembaga peneliti, maupun swasta (IKM)

- 10) Berupaya melakukan proses pemutakhiran (updating) data secara kontinyu dan bertahap melalui pendekatan pendataan berbasis sentra dan individual IKM binaan.
- 11) Upaya perluasan akses pasar dilakukan melalui keikutsertaan dalam gelar pameran skala lokal, regional maupun nasional, serta terus menjalin sinergitas dan kerjasama dengan pihak – pihak lain seperti perusahaan manufactur skala besar yang bisa turut mengakomodir produk – produk lokal.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

1. Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD (Embrio), dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.
2. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program / kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program /kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.
3. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal bagaimana Tabel Terlampir :

Tabel 2.12 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				66.000	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				90.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	42.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	60.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	15 Dokumen	24.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				48.690	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				60.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tegal	Tercukupinya Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	12 Bulan	48.690	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tegal	Tercukupinya Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	12 Bulan	60.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tegal	Terlaksananya Diklat, Bimtek	1 Paket	10.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tegal	Terlaksananya Diklat, Bimtek	1 Paket	65.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				246.473	Administrasi Umum Perangkat Daerah				350.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tegal	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	28.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tegal	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	26.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tegal	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	55.741	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tegal	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	100.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tegal	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	15.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tegal	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	30.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tegal	Tersedianya Makan dan Minum	12 Bulan	45.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tegal	Tersedianya Makan dan Minum	12 Bulan	46.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tegal	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	20.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tegal	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	44.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tegal	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	7.232	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tegal	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	14.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tegal	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	75.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tegal	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	90.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.150.297	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.602.797	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tegal	Tercukupinya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tegal	Tercukupinya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	177.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tegal	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tegal	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Paket	375.000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tegal	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Perindustrian	1 Paket	3.050.297	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tegal	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Perindustrian	1 Paket	3.050.297	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				354.440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tegal	Terbayarnya tagihan rekening telepon, air, listrik	12 Bulan	200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tegal	Terbayarnya tagihan rekening telepon, air, listrik	12 Bulan	300.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tegal	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	54.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tegal	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				348.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tegal	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Operasional	12 Bulan	200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tegal	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Operasional	12 Bulan	325.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tegal	Tercukupinya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	48.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tegal	Tercukupinya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tegal	Tercukupinya Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	1 Paket	100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tegal	Tercukupinya Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	1 Paket	150.000	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Laboratorium Uji dan Pemesinan (UPTD LAB.)	1 Paket				Pemeliharaan Rutin Berkala Laboratorium Uji dan Pemesinan (UPTD LAB.)	1 Paket		
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	50.000	
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja		Tersusunnya dokumen rencana Tenaga Kerja	-	0	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja		Tersusunnya dokumen rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Tegal	Dokumen rencana tenaga kerja makro	-	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Tegal	Dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen		

	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0.009		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0.009		
			Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	5,50				Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	5,50		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	46,24	1.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	46,24	400.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Tegal	Jumlah Penganggur yang dilatih	300	1.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Tegal	Jumlah Penganggur yang dilatih	300		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPK yang terakreditasi	14,29	38.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPK yang terakreditasi	14,29	432.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Tegal	Persentase Instruktur bersertifikat kompetensi	55	38.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Tegal	Persentase Instruktur bersertifikat kompetensi	55		

			Persentase LPK yang memiliki perizinan	52				Persentase LPK yang memiliki perizinan	52		
	Pengukuran produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi tenaga kerja	300	30.000	Pengukuran produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi tenaga kerja	300	250.000	
	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	Kab. Tegal	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi tenaga kerja	300	30.000	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	Kab. Tegal	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi tenaga kerja	300		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	30,00		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	30,00	200.000	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui informasi pasarkerja (IPK) online	2.976	110.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui informasi pasarkerja (IPK) online (SISNAKER)	2.976	120.000	

			(SISNAKER)									
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Tegal	Jumlah Pencarikerja yang terdaftar di Kabupaten	16.589	110.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Tegal	Jumlah Pencarikerja yang terdaftar di Kabupaten	16.589			
			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI/CTKI yang terdata	213					Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI/CTKI yang terdata	213		
			Lowongan kerja yang tersedia diwilayah kabupaten	2.965					Lowongan kerja yang tersedia diwilayah kabupaten	2.965		
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Pekerja Migran (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan diklat kerja	0	-	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Pekerja Migran (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan diklat kerja	250			

	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Tegal	Data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	-	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Tegal	Data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	40		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	7,78		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	7,78	275.000	

	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	41,98	45.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	41,98	98.000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Tegal	Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	24,19	45.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Tegal	Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	24,19	98.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,05	95.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,05	177.000	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	Kab. Tegal	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh mediator Hubungan	92,59	95.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	Kab. Tegal	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh mediator Hubungan	92,59	177.000	

			Industrial					Industrial				
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	70				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	70	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan industri dalam RPIK	70	70.000			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan industri dalam RPIK	70	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Kab. Tegal	Jumlah penguatan sentra unggulan Kab. Tegal	90 sentra	70.000			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Kab. Tegal	Jumlah penguatan sentra unggulan Kab. Tegal	90 sentra	50.000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Tegal	Jumlah pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan standarisasi	275 IKM	70.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Tegal	Jumlah pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan standarisasi	275 IKM	400.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Tegal	Jumlah pembangunan infrastruktur industri kecil menengah	15 IKM	280.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Tegal	Jumlah pembangunan infrastruktur industri kecil menengah	15 IKM	1.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Tegal	Jumlah pengembangan wirausaha baru	15 kelompok WUB	200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Tegal	Jumlah pengembangan wirausaha baru	15 kelompok WUB	375.000	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Tegal	Pembinaan sektor industri unggulan terhadap semua jumlah sektor industri unggulan	75 IKM	20.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Tegal	Pembinaan sektor industri unggulan terhadap semua jumlah sektor industri unggulan	75 IKM	100.000	

	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB./KOTA		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB./KOTA		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100		
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis	100	16.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis	100		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan	Kab. Tegal	Persentase Jumlah Rekomendasi	100%	8.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan	Kab. Tegal	Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha	100%	200 juta	

	Kab/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis			Kab/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis			
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan (IUI) kewenangan Kab/Kota dalam memenuhi ketentuan perizinan	Kab. Tegal	Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan terhadap permohonan yang masuk SIINas	100%	8.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan (IUI) kewenangan Kab/Kota dalam memenuhi ketentuan perizinan	Kab. Tegal	Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan terhadap permohonan yang masuk SIINas	100%	50.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	60		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	60		
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan		Persentase data IKM yang masuk dalam SII Nas terhadap total	30		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan		Persentase data IKM yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi IKM	30		

	Kabupaten/Kota		populasi IKM			Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Tegal	Persentase Jumlah IKM yang melakukan pelaporan usaha melalui SIINas terhadap IKM yang masuk di SIINas	75%	7.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Tegal	Persentase Jumlah IKM yang melakukan pelaporan usaha melalui SIINas terhadap IKM yang masuk di SIINas	75%	25.000	
	Desiminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kab/Kota	Kab. Tegal	Tersusunnya data base IKM	6 Kecamatan	15.000	Desiminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kab/Kota	Kab. Tegal	Tersusunnya data base IKM	6 Kecamatan	300.000	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	100		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	100		
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	3 KK		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	3 KK		

	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota		Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	3 KK	45.500	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota		Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	3 KK		
--	---	--	--	------	--------	---	--	--	------	--	--

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.

Tabel 2.13 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Tegal

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Desa Lumingser	Pelatihan Montir Mobil Desa Lumingser	1 Paket	Disetujui
2		Desa Penarukan	Pelatihan Mekanik Sepeda Motor	1 Paket	Disetujui
3		Desa Pecangakan	Pelatihan Mekanik Sepeda Motor Desa Pecangakan	1 Paket	Disetujui
4		Desa Danareja	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Disetujui
5		Desa Cibunar	Pelatihan Komputer	1 Paket	Disetujui
6		Desa Danawarih	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Tidak disetujui
7		Desa Banjaranyar	Pelatihan Las	1 Paket	Disetujui
8		Desa Tembongwah	Pelatihan Montir Mobil	1 Paket	Tidak disetujui

9	Desa Cilongok	Pelatihan Komputer	1 Paket	Disetujui
10	Desa Gunungjati	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Disetujui
11	Desa Pucang Luwuk	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Disetujui
12	Desa Dukuhtengah	Pelatihan Petukangan/Mebelair	1 Paket	Disetujui
13	Desa Sangkanayu	Pelatihan Petukangan/Mebelair	1 Paket	Disetujui
14	Desa Cikura	Pelatihan Komputer	1 Paket	Disetujui
15	Desa Bojong	Pelatihan Mekanik Sepeda Motor	1 Paket	Disetujui
16	Desa Bojong	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Tidak disetujui
17	Desa Bojong	Pelatihan Las	1 Paket	Tidak disetujui
18	Desa Ketanggungan	Pelatihan Jahit	1 Paket	Disetujui
19	Desa Pagongan	Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak disetujui
20	Desa Debong Wetan	Pelatihan Montir Mobil	1 Paket	Tidak disetujui
21	Desa Debong Wetan	Pelatihan Mekanik Sepeda Motor Desa	1 Paket	Disetujui
22	Desa Pengabean	Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak disetujui
23	Desa Pengarasan	Pelatihan Montir Mobil	1 Paket	Disetujui
24	Desa Pengarasan	Pelatihan Komputer	1 Paket	Disetujui
25	Desa Dukuhturi	Pelatihan Jahit	1 Paket	Disetujui
26	Desa Kepandean	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Disetujui
27	Desa Pedagangan	Pelatihan Mekanik Sepeda Motor	1 Paket	Tidak Disetujui
28	Desa Tamansari	Pelatihan Komputer	1 Paket	Disetujui
29	Desa Padasari	Pelatihan Pertukangan/ Mebeleur	1 Paket	Disetujui
30	Desa Capar	Pelatihan Las	1 Paket	Disetujui
31	Desa Iebakwangi	Pelatihan Las	1 Paket	Disetujui
32	Desa Penyalahan	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Disetujui
33	Desa Kedungwungu	Pelatihan Montir Mobil	1 Paket	Tidak Disetujui
34	Desa Kedungwungu	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Tidak Disetujui
35	Desa Cerih	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Disetujui
36	Desa	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Disetujui

	Kedungbanteng			
37	Desa Babakan	Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak Disetujui
38	Desa Bangungalih	Pelatihan Komputer	1 Paket	Disetujui
39	Desa Kertayasa	Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak Disetujui
40	Desa Ketileng	Pelatihan Tukang Finishing Kayu	1 Paket	Disetujui
41	Desa Ketileng	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Tidak Disetujui
42	Mejasem Timur	Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak Disetujui
43	Desa Kepunduhan	Pelatihan Montir Mobil	1 Paket	Tidak Disetujui
44	Desa Prupuk Utara	Pelatihan Komputer	1 Paket	Disetujui
45	Desa Dukuh Tengah	Pelatihan Jahit	1 Paket	Disetujui
46	Desa Kaligayam	Pelatihan Komputer	1 Paket	Disetujui
47	Desa Pakulaut	Pelatihan Montir Mobil	1 Paket	Disetujui
48	Desa Danaraja	Pelatihan Montir Mobil	1 Paket	Disetujui
49	Desa Wanasari	Pelatihan Komputer	1 Paket	Disetujui
50	Desa Jatilaba	Pelatihan Komputer	1 Paket	Disetujui
51	Desa Karangdawa	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Disetujui
52	Desa Karangdawa	Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak Disetujui
53	Desa Kalisalak	Pelatihan Mekanik Sepeda Motor	1 Paket	Tidak Disetujui
54	Desa Kalisalak	Pelatihan Teknik Pendingin	1 Paket	Tidak Disetujui
55	Desa Kalisalak	Pelatihan Listrik Industri	1 Paket	Disetujui
56	Desa Marga Ayu	Pelatihan Listrik Industri	1 Paket	Disetujui
57	Desa Marga Ayu	Pelatihan Pertukangan Mebeleur	1 Paket	Tidak Disetujui
58	Desa Kertaharja	Pelatihan Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak Disetujui
59	Desa Kedungsugih	Pelatihan Jatih	1 Paket	Disetujui
60	Desa Pecabean	Pelatihan Las	1 Paket	Disetujui
61	Kel. Kagok	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Disetujui
62	Kel. Procot	Pelatihan Montir Mobil	1 Paket	Tidak Disetujui
63	Kel. Kudaile	Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak Disetujui

64	Desa Slawi Kulon	Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak Disetujui
65	Desa Slawi Kulon	Pelatihan Mekanik Sepeda Motor	1 Paket	Disetujui
66	Desa Slawi Kulon	Pelatihan cara produksi pangan olahan yang baik dan benar	1 Paket	Tidak Disetujui
67	Desa Kalisapu	Pelatihan Teknik Pendingin	1 Paket	Disetujui
68	Desa Dukuhsalam	Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak Disetujui
69	Desa Karangwuluh	Pelatihan Jahit	1 Paket	Disetujui
70	Desa Jatibogor	Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak Disetujui
71	Mindaka	Pelatihan Teknik Pendingin	1 Paket	Disetujui
72	Kedokansayang	Pelatihan Komputer	1 Paket	Disetujui
73	Kemanggungan	Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak Disetujui
74	Karangjati	Pelatihan Tehnik Pendingin	1 Paket	Disetujui
75	Brekat	Pelatihan Teknik Pendingin (AC)	1 Paket	Disetujui
76	Kedungbungkus	Pelatihan Service HP	1 Paket	Tidak Disetujui
77	Desa Sigentong	Pelatihan Komputer	1 Paket	Tidak Disetujui
78	Desa Banjarturi	Pelatihan Menjahit	1 Paket	Disetujui
79	Desa Bogares Kidul	Pelatihan Montir Mobil	1 Paket	Tidak Disetujui

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi – asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten / Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Usulan Program dan Kegiatan dari Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2022 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal terdapat 79 usulan, yang terdiri dari 81 Paket Kegiatan, 67 Desa dan 10 Jenis Klaster Pelatihan. Namun karena keterbatasan anggaran yang tersedia dan mempertimbangkan beberapa Desa yang sebelumnya sudah mendapat pelatihan serta ada Desa yang mengusulkan lebih dari satu usulan kegiatan maka dari 79 usulan, hanya 50 yang disetujui untuk dilaksanakan di Tahun 2022 Pada Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL



Rencana Kerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tegal Tahun 2022

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN TEGAL

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian RI

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 telah menyinkronkan dengan Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024 yaitu :

Tabel 3.1. : Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Strategis Kementrian Perindustrian Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong

Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Sasaran : - Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas - Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 - Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri - Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri - Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) - Meningkatkan	- Pengembangan Sektor Industri yang belum maksimal - Masih ada usaha industri yang melakukan pelanggaran baik yang sudah berizin maupun belum berizin - Masih rendahnya data industri yang terverifikasi	a. Lemahnya daya saing industri karena kurang berkembangnya sistem inovasi daerah. b. Rendahnya terapan sistem manajemen mutu. c. Lambatnya manajemen informasi mengakibatkan response yang tidak tepat terhadap perubahan pasar. d. Kurangnya penghargaan terhadap karya intelektual/produk hasil invensi. e. Rendahnya proses alih teknologi dalam	a. Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian. b. Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD Kabupaten. c. Tumbuh

Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Persebaran Industri		rangka pengembangan mutu produk. f. Aksestabilitas masih rendah terhadap sumber-sumber pembiayaan alternatif. g. Rendahnya kreatifitas masyarakat menjadikan kurang berkembangnya sektor industri berbasis pengetahuan dan pelestarian budaya setempat.	kembangnya industri kecil sebagai alternative lapangan pekerjaan

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk menjadi substitusi produk impor. Hal ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap barang modal dan bahan baku serta melengkapi struktur pohon industri di tanah air. Target substitusi impor dapat mencapai 35% pada tahun 2022. Langkah yang ditempuh untuk mewujudkan kebijakan tersebut, antara lain substitusi impor pada industri yang tercatat memiliki nilai impor besar di tahun 2019. Sektor yang dimaksud meliputi industri mesin, kimia, logam, elektronika, makanan, peralatan listrik, tekstil, kendaraan bermotor, barang logam, serta karet dan barang dari karet.

Untuk mengembangkan sektor industri kecil dan menengah (IKM), Kemenperin telah menempuh beberapa upaya, antara lain memfasilitasi penyerapan bahan baku bagi pelaku IKM, optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk semua sektor, menjalankan kampanye Bangga Buatan Indonesia, serta terus mendorong pelaksanaan Program P3DN. Melihat sasaran strategis Kementerian

Perindustrian RI substitusi impor 35% pada tahun 2022 maka pelaksanaan program dan kegiatan urusan perindustrian di Kabupaten Tegal Tahun 2022 diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan tersebut. Disamping penguatan kampanye penggunaan produk-produk dalam negeri terus massif kepada seluruh elemen di Kabupaten Tegal.

3.1.2. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 telah menyinkronkan dengan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 yaitu :

Tabel 3.2. : Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan RI Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong

Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Sasaran : - Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.	- Penanganan pengangguran tidak terencana secara sistematis	a. Jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja; b. Masih rendahnya	a. Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian. b. Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah

Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.		<p>kualitas pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia;</p> <p>c. Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja didalam negeri maupun di Luar Negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/ Pelaku Usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja;</p> <p>d. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;</p> <p>e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja;</p> <p>f. Masih banyaknya perusahaan yang belum membentuk Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;</p> <p>g. Masih kurang adanya pemahaman terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p> <p>h. Masih adanya perusahaan yang membayar Upah Minimum dibawah UMK yang telah ditetapkan.</p> <p>i. Banyaknya perusahaan yang</p>	<p>pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD Kabupaten.</p> <p>c. Tumbuh kembangnya industri kecil sebagai alternative lapangan pekerjaan</p> <p>d. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk media penyebaran informasi lapangan kerja.</p> <p>e. Terbukanya peluang kerja sama dalam penempatan tenaga kerja keluar daerah dan luar negeri.</p> <p>f. Mengikuti sertakan serta staf yang masih muda yang memiliki kompetensi dibidang pemanfaatan teknologi dan bidang teknis ketenagakerjaan.</p>

Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
		belum sepenuhnya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS;	

Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2022 akan membentuk Pusat Pasar Kerja yang ideal yang terintegrasi. Pembentukan pusat data pasar kerja ini bertujuan untuk memberikan informasi dan data kepada *stakeholders* yang terdiri dari pemberi kerja, pencari kerja, akademisi, dan pemerintah, pusat data pasar kerja ini sangat dibutuhkan karena pasar kerja Indonesia masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari banyaknya lulusan pendidikan yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya, rendahnya produktifitas tenaga kerja, dan kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Pusat data pasar kerja itu akan berisi job matching, bimbingan karir, serta analisis dan informasi pasar kerja.

Pada tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan mencanangkan ***Bebas Tenaga Kerja Anak***, Provinsi Jawa Tengah menempati urutan terbanyak dalam jumlah kasus anak yang tidak bersekolah dan menjadi pekerja anak. Hal ini diperlukan sinergisitas antara stakeholders yang terkait dalam penanganannya.

3.1.3. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 telah menyinkronkan dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 yaitu :

Tabel 3.3. : Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong

Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Sasaran : - Meningkatnya Laju Pertumbuhan sektor industri	- Pengembangan Sektor Industri yang belum maksimal - Masih ada usaha industri yang melakukan pelanggaran baik yang sudah berizin maupun belum berizin	a. Lemahnya daya saing industri karena kurang berkembangnya sistem inovasi daerah. b. Rendahnya terapan sistem manajemen mutu. c. Lambatnya manajemen informasi mengakibatkan response yang tidak tepat terhadap perubahan pasar.	a. Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian. b. Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD Kabupaten. c. Tumbuh
	- Masih rendahnya data industri yang terverifikasi	d. Kurangnya penghargaan terhadap karya intelektual/produk hasil invensi.	

Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
		e. Rendahnya proses alih teknologi dalam rangka pengembangan mutu produk. f. Aksestabilitas masih rendah terhadap sumber-sumber pembiayaan alternatif. g. Rendahnya kreatifitas masyarakat menjadikan kurang berkembangnya sektor industri berbasis pengetahuan dan pelestarian budaya setempat.	kembangnya industri kecil sebagai alternative lapangan pekerjaan d. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk media penyebarluasan informasi lapangan kerja. e. Terbukanya peluang kerja sama dalam penempatan tenaga kerja keluar daerah dan luar negeri. f. Mengikutsertakan serta staf yang masih muda yang memiliki kompetensi dibidang pemanfaatan teknologi dan bidang teknis ketenagakerjaan.

3.1.4. Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 telah menyinkronkan dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 yaitu :

**Tabel 3.4. : Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja &
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 Beserta
Faktor Penghambat Dan Pendorong**

Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
<p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja - Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial dan jaminan social - Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja - Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan pengangguran tidak terencana secara sistematis 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja; b. Masih rendahnya kualitas pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia; c. Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja didalam negeri maupun di Luar Negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/ Pelaku Usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja; d. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja; e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja; f. Masih banyaknya perusahaan yang belum membentuk Peraturan Perusahaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian. b. Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD Kabupaten. c. Tumbuh kembangnya industri kecil sebagai alternative lapangan pekerjaan d. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk media penyebaran informasi lapangan kerja. e. Terbukanya peluang kerja sama dalam penempatan tenaga kerja keluar daerah dan luar negeri. f. Mengikut sertakan serta staf yang masih muda yang memiliki kompetensi dibidang pemanfaatan teknologi dan bidang teknis ketenagakerjaan.

Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
		Perjanjian Kerja Bersama; g. Masih kurang adanya pemahaman terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). h. Masih adanya perusahaan yang membayar Upah Minimum dibawah UMK yang telah ditetapkan. i. Banyaknya perusahaan yang belum sepenuhnya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS;	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk melihat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL YANG SEJAHTERA MANDIRI, UNGGUL, BERBUDAYA, BERAHLAK MULIA”

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, berahlak mulia, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka akuntabel dan efektif melayani rakyat;
- b. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan Infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi berwawasan lingkungan;
- c. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib aman tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Telaah terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam rangka mendukung misi (3) dan (4) yaitu **“Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan”** dan **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan**

sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

3.2.1 Tujuan dan Sasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tegal yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 maka ditetapkanlah rencana pembangunan jangka menengah atau jangka lima tahunan dan jangka pendek atau tahunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat Industri;
2. Menekan Laju Tingkat Pengangguran.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat Industri dengan Sasaran yang akan dicapai :

- Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah.

Tujuan 2 Menekan Laju Tingkat Pengangguran dengan Sasaran yang akan dicapai :

- Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja;
- Meningkatnya Layanan Transmigrasi.

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Tujuan Renstra 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat industri		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri	Persen	-0,91	-0,91	2,25	4,56	5,40	6,56
		Sasaran Renstra 1.1. : Meningkatkan Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	Persen	60	60	60	70	80	100
2	Tujuan Renstra 2 : Menekan Laju Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,82	9,82	10,42	10,21	9,54	8,45
		Sasaran Renstra 2.1. : Meningkatkan layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	Persen	-49,55	-49,55	5	10	15	20
		Sasaran Renstra 2.2. : Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial	Persen	50	50	55	65	70	70
		Sasaran Renstra 2.3. : Meningkatkan Layanan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	Persen	0	0	100	100	100	100

Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Pembangunan di Kabupaten Tegal didesain melakukan pengarusutamaan (mainstreaming) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengarusutamaan (mainstreaming) merupakan upaya untuk menjadikan isu-isu pengarusutamaan sebagai perspektif, sebagai cara pandang dan cara bertindak dalam melaksanakan pembangunan. Program dan kegiatan dalam pengarusutamaan (mainstreaming) tidak harus selalu eksplisit memuat nomenklatur isu-isu pengarusutamaan (mainstreaming) namun dapat secara implisit mendukung terwujudnya isu-isu pengarusutamaan (mainstreaming). Isu-isu pengarusutamaan dalam pembangunan di Kabupaten Tegal yaitu:

a. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) didesain sebagai perspektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Pembangunan yang responsif gender memberi ruang yang cukup bagi konstruksi gender laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, pengawasan dan manfaat dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatan ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.

b. Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting).

Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi dilakukan melalui intervensi yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi konvergensi stunting

sebagai penjabaran Renstra dan Renja. Perangkat Daerah yang terlibat aktif dalam pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) terutama Dinkes (Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan); Dis Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketahanan Pangan dan Produksi Pangan berkelanjutan); DP3AP2KB (Keluarga Sejahtera); Disdikbud (PAUD); Disperkim (Sanitasi); DLH (Sanitasi); Dispermades (Kebijakan Desa); Bappeda dan Litbang (Aksi Konvergensi Stunting) DPUPR (infrastruktur, sanitasi); Dinsos (kemiskinan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial); DKP (perikanan); Disperinaker (perindustrian, tenaga kerja); Disdakop UKM (Perdagangan, koperasi, UMKM).

c. Pengarusutamaan inovasi

Kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan didesain dengan menerapkan dengan inovasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat mendesain inovasi-inovasi sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang diimplementasikan. Agar inovasi yang ditetapkan memiliki daya ungkit dan dampak pembangunan yang memadai, inovasi didesain melalui pemenuhan instrumen yang sesuai dengan kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi daerah. Kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi didesain sebagai upaya mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maupun pembangunan berkelanjutan dalam arti yang lebih luas diantaranya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), kependudukan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial. Perpektif pembangunan berkelanjutan mewarnai perencanaan program,

kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah yang diturunkan ke dalam Renstra dan Renja.

e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi

Kelompok inklusi merupakan anggota masyarakat yang memiliki karakteristik khas dan seringkali berada pada posisi yang marjinal dalam pembangunan. Kelompok inklusi ini antara lain difabel, lansia, pemuda, masyarakat miskin/tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain yang masih marjinal. Dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah didesain dengan perspektif memuliakan kelompok inklusi dalam membuka ruang akses, peran, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

f. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi perspektif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam kebijakan, rencana, program urusan-urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman rakyat, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Integrasi SPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah diterapkan melalui penetapan indikator kinerja SPM sebagai indikator kinerja *outcome* program pembangunan. Komitmen pengarusutamaan SPM diimplementasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di dalam Renstra dan Renja.

g. Pengarusutamaan Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko pembangunan merupakan salah satu sistem agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Mitigasi risiko pembangunan merupakan tugas melekat pada masing-masing Perangkat Daerah. Dalam melakukan mitigasi risiko dilakukan identifikasi potensi risiko dalam Register Risiko. Register Risiko

merupakan identifikasi potensi risiko yang paling mungkin terjadi atau kebijakan rencana program yang memiliki risiko paling tinggi. Dari Register Risiko disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). RTP disusun dengan memperhatikan Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern.

3.3 Program dan Kegiatan

Renstra akan menjadi acuan utama bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam menentukan Program dan Kegiatan di tahun 2022 sekalipun anggaran tidak mendukung bagi pencapaian sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan/Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 yang mengacu pada Lampiran RKPD Tahun 2022 sebagaimana termuat dalam Tabel terlampir.

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Tegal Tahun 2022

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan (IUI) kewenangan Kab/Kota dalam memenuhi ketentuan perizinan

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	Kegiatan Pengukuran produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



Rencana Kerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tegal Tahun 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel. 4.1 di bawah ini :

**Tabel 4.1 (T-C.33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Tahun 2022 Dan Prakiran Maju Tahun 2023 Kabupaten Tegal**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.213.748.000			543.260.000			
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					4.978.748.000			273.010.000			
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					4.910.748.000			194.810.000			
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Penganggu r yang dilatih		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		200 orang		4.910.748.000			194.810.000
2	07	03	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					38.000.000			43.700.000			

2	07	03	2,02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Instruktur Bersertifikat Berkompetensi Persentase LPK yang memiliki Perizinan		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		55 Orang 52 LPK		38.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				43.700.000
2	07	03	2,05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							30.000.000						34.500.000
2	07	03	2,05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah lulusan Bersertifikat kompetensi tenaga kerja		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		300 Orang		30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34.500.000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							110.000.000						126.500.000
2	07	04	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							110.000.000						126.500.000
2	07	04	2,03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI / CTKI yang terdata Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Lowongan Kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		213 Orang 16589 Orang 2965 Dokum		110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				126.500.000

2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							125.000.000				143.750.000
2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							45.000.000				51.750.000
2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Presentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		24.19 Persen	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			51.750.000
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							80.000.000			92.000.000	
2	07	05	2,02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Presentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan oleh Mediator HI		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		92.59 Persen	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			92.000.000

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										6.978.556.000				6.852.800.450
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6.250.556.000				6.096.100.450
3	31	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										69.000.000				79.350.000
3	31	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		6 dokumen		45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				51.750.000	
3	31	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		15 dokumen		24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27.600.000	
3	31	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5.196.525.000				4.937.380.000
3	31	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								5.147.835.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4.881.387.000	
3	31	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tercukupinya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		12 bulan		48.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55.993.000	

3	31	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							10.000.000					11.500.000	
3	31	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Diklat Pegawai		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		1 paket		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11.500.000
3	31	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							212.333.000				244.182.950		
3	31	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedia nya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		1 paket		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23.000.000
3	31	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedia nya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		1 paket		55.741.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				64.102.150
3	31	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedia nya Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan		10.592.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12.180.800

3	31	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupin ya Bahan Logistik Kantor		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		12 bulan		45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				51.750.000
3	31	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediany a Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		12 bulan		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23.000.000
3	31	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediany a Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		12 bulan		6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6.900.000
3	31	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana nya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		12 bulan		55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				63.250.000
3	31	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000					57.500.000	

3	31	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		1 paket		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				57.500.000
3	31	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						384.198.000				422.912.500		
3	31	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		12 bulan		200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				230.000.000
3	31	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		12 bulan		184.198.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				192.912.500
3	31	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						328.500.000				343.275.000		
3	31	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		12 bulan		200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				230.000.000

3	31	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukuinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		12 bulan		98.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55.775.000
3	31	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		12 bulan		30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				57.500.000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						670.000.000					713.000.000	
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						670.000.000					713.000.000	
3	31	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Penguatan Sentra Unggulan Kab. Tegal		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		95 sentra		60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				69.000.000
3	31	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Standarisasi				225 IKM		60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				69.000.000

3	31	02	2,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pembangunan Infrastruktur IKM		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		15 IKM		280.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				322.000.000	
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pengembangan Wirausaha Baru		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		15 Kelompok WUB		260.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				230.000.000	
3	31	02	2,01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pembinaan Sektor Industri Unggula terhadap semua jumlah sektor Industri Unggulan		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		75 IKM		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23.000.000	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						16.000.000						18.400.000	
3	31	03	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						16.000.000							18.400.000

3	31	03	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Presentase Jumlah Rekomendasi Teknis IUI yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18.400.000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							42.000.000					25.300.000	
3	31	04	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							42.000.000					25.300.000	
3	31	04	2,01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Presentase Jumlah IKM yang melakukan Pelaporan Usaha melalui SiiNas terhadap IKM yang masuk SiiNas				75 persen		7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8.050.000
3	31	04	2,01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Tersusunnya database IKM		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan		6 kecamatan		35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17.250.000

3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							45.500.000			52.325.000		
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							45.500.000			52.325.000		
3	32	03	2,01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							45.500.000			52.325.000		
3	32	03	2,01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Transmigran yang ditempatkan				100 Persen		45.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52.325.000
TOTAL											12.237.804.000			7.448.385.450			

BAB V

PENUTUP



Rencana Kerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tegal Tahun 2022

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai atau dilaksanakan, dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal pada Tahun 2022.

Rencana Kerja juga merupakan acuan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Pembangunan, dan Rencana Kerja juga dapat digunakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Tegal.

Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Rencana Kerja ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja baik di Tingkat Daerah maupun Perangkat Daerah. Indikator Kinerja yang ditetapkan menjadi acuan bagi setiap atasan dalam menilai bawahan.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan Pembangunan di bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tegal dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Hasil-hasil pembangunan diharapkan mampu mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

5.1. CATATAN PENTING

Peningkatan Pendampingan & Pembinaan IKM pada tahun 2022 dilaksanakan dengan meningkatkan kemudahan ketersediaan bahan baku logam dengan pengembangan

jaringan *material centre*, meningkatkan kapasitas SDM Industri melalui pelatihan produksi di bidang logam, tekstil dan makanan / minuman, meningkatkan kualitas produk IKM melalui fasilitasi / sertifikasi produk (SNI, BKI, LMK, TKDN, dll), dan mengembangkan akses pasar digital sebagai sarana marketing produk IKM serta mendampingi IKM dalam penerapan 5R, GMP, CPPOB dll secara optimal. Selanjutnya dalam Peningkatan Kesadaran pelaku usaha tentang legalitas usaha / perijinan dilaksanakan melalui Sosialisasi tentang Perijinan Industri (OSS & SIINas), meningkatkan layanan verifikasi SIINas dan dilakukan evaluasi & monitoring perijinan Industri bagi IKM. Sebagai pendukung pelaksanaan pendampingan dan pembinaan IKM, diperlukan *upgrading* data IKM melalui kegiatan Verifikasi Database IKM yang rencananya akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tarub, Kramat, Dukuhwaru, Pagerbarang, dan Jatinegara.

Sebagai bentuk upaya dalam menekan laju tingkat pengangguran tahun 2022 dilaksanakan Peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja, serta profesionalisme kepelatihan melalui perluasan kesempatan kerja dan penempatan, memberikan fasilitasi pelatihan, meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan kerjasama daerah / penempatan transmigrasi. Selain itu juga dilaksanakan Peningkatan pembinaan, pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perlindungan tenaga kerja dengan meningkatkan layanan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan di kabupaten Tegal secara optimal dan berkelanjutan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, pada pelaksanaannya selanjutnya akan memperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal pada implementasinya berkewajiban untuk berusaha pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal tahun 2019-2024.
- b. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal akan benar-benar menggunakan dan/atau memperhatikan Rencana Kerja tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagai dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal tahun 2022 terutama dalam pencapaian kinerja kegiatan.
- c. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 akan menjadi/merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022.
- d. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal selanjutnya akan dilakukan evaluasi

pada akhir pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.

- e. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan akan benar-benar memperhatikan proses pelaksanaannya (berbasis pada proses), sehingga target dari indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022, selanjutnya akan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 setelah diselaraskan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Akhirnya dengan memohon rahmat Allah SWT. semoga Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan eksistensialnya dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Tegal.

Slawi, 2021
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tegal

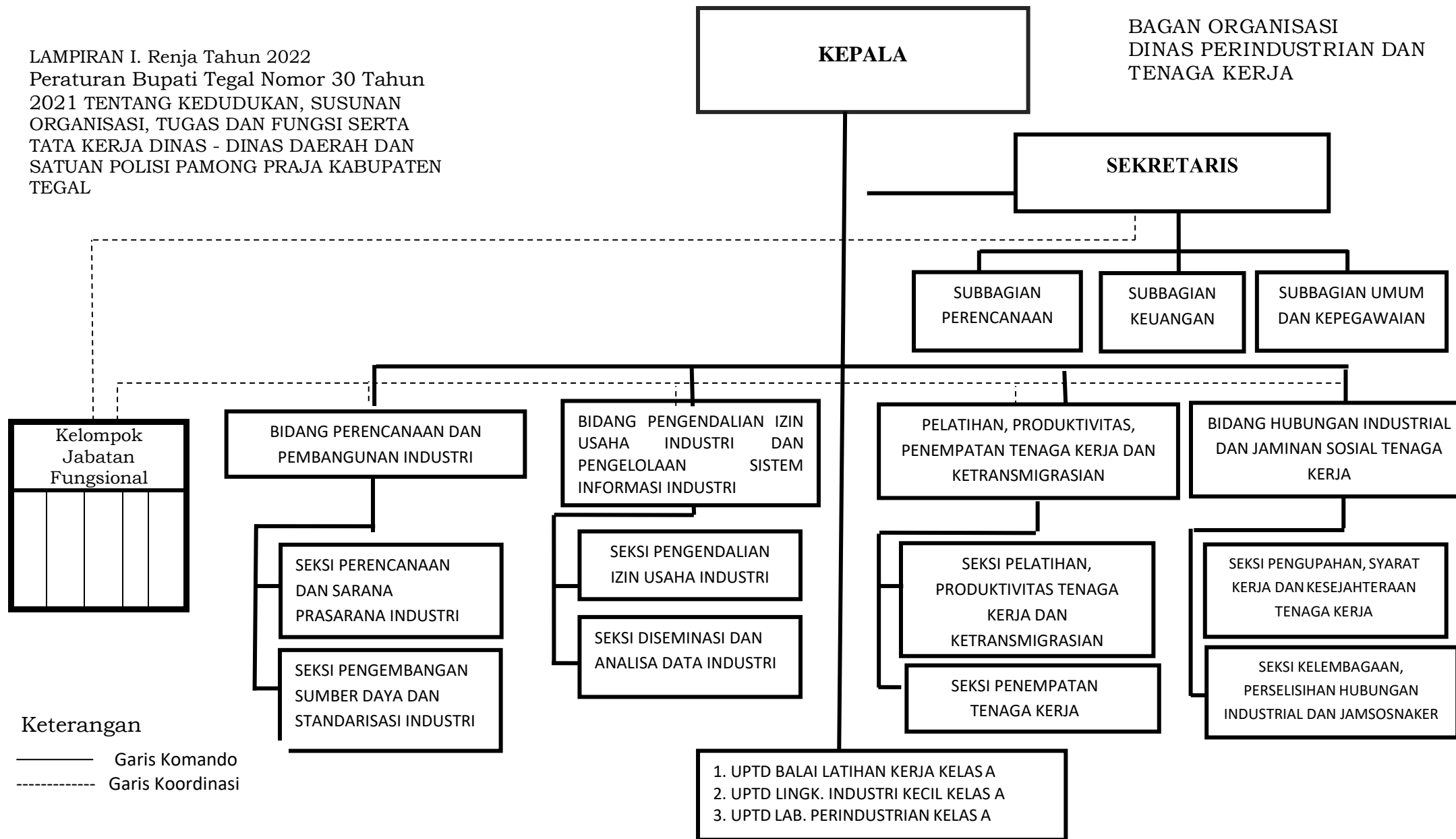
MOH. NUR MA'MUN, SH.M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19620816 198703 1 009

LAMPIRAN I. Renja Tahun 2022
 Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun
 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH DAN
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
 TEGAL

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 TENAGA KERJA



Keterangan

- Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi